

	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perkotaan	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Angkutan Penumpang Umum yang Beroperasional	75%	Rp 71.978.080	90%	Rp 70.727.700	92%	Rp 77.800.470	94%	Rp 85.580.566	96%	Rp 94.138.569	98%	Rp 103.552.426	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	Rp 71.978.080	12 Laporan	Rp 70.727.700	12 Laporan	Rp 77.800.470	12 Laporan	Rp 85.580.566	12 Laporan	Rp 94.138.569	12 Laporan	Rp 103.552.426	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Angkutan Orang Dalam Trayek	100%	Rp-	100%	Rp-	100%	Rp 5.000.000	100%	Rp 5.500.000	100%	Rp 6.050.000	100%	Rp 6.655.000	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	Rp 5.000.000	12 Laporan	Rp 5.500.000	12 Laporan	Rp 6.050.000	12 Laporan	Rp 6.655.000	Dinas Perhubungan		
		2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen/SK Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Penumpang Umum	-	Rp-	1 Dokumen	Rp-	1 Dokumen	Rp 4.000.000	1 Dokumen	Rp 4.400.000	1 Dokumen	Rp 4.840.000	1 Dokumen	Rp 5.324.000	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Rp-	1 Laporan		1 Laporan	Rp 2.000.000	1 Laporan	Rp 2.200.000	1 Laporan	Rp 2.420.000	1 Laporan	Rp 2.662.000	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Rp-	1 Laporan		1 Laporan	Rp 2.000.000	1 Laporan	Rp 2.200.000	1 Laporan	Rp 2.420.000	1 Laporan	Rp 2.662.000	Dinas Perhubungan
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi	50%	Rp 4.370.000	50%	Rp 2.346.000	55%	Rp 12.580.600	60%	Rp 13.838.660	65%	Rp 15.222.526	70%	Rp 16.744.779	Dinas Perhubungan
		2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 2.696.000	100%	Rp 600.000	100%	Rp 660.000	100%	Rp 726.000	100%	Rp 798.600	100%	Rp 878.460	Dinas Perhubungan
		2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	Rp 2.696.000	4 Laporan	Rp 600.000	20 Laporan	Rp 660.000	20 Laporan	Rp 726.000	20 Laporan	Rp 798.600	20 Laporan	Rp 878.460	Dinas Perhubungan

		2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Lokal	-	Rp -	25%	Rp-	25%	Rp 10.000.000	25%	Rp 11.000.000	30%	Rp 12.100.000	35%	Rp 13.310.000	Dinas Perhubungan
		2.15.03.2.10.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Lokal	-	-	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 11.000.000	1 Dokumen	Rp 12.100.000	1 Dokumen	Rp 13.310.000	Dinas Perhubungan
		2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpuan Lokal yang Terawasi	2 Unit	Rp 1.674.000	2 Unit	Rp 1.746.000	2 Unit	Rp 1.920.600	2 Unit	Rp 2.112.660	2 Unit	Rp 2.323.926	2 Unit	Rp 2.556.319	Dinas Perhubungan
		2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Lokal	7 Laporan	Rp 1.674.000	12 Laporan	Rp 1.746.000	4 Laporan	Rp 1.920.600	4 Laporan	Rp 2.112.660	4 Laporan	Rp 2.323.926	4 Laporan	Rp 2.556.319	Dinas Perhubungan
		2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase bandar udara yang beroperasi	100%	Rp 155.000.000	100%	Rp 24.877.200	100%	Rp 30.000.000	100%	Rp 33.000.000	100%	Rp 36.300.000	100%	Rp 39.930.000	Dinas Perhubungan
		2.15.04.2.01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Bandar Udara	16 Laporan	Rp 155.000.000	12 Laporan	Rp 24.877.200	1 Laporan	Rp 30.000.000	1 Laporan	Rp 33.000.000	1 Laporan	Rp 36.300.000	1 Laporan	Rp 39.930.000	Dinas Perhubungan
		2.15.04.2.01.0002	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	1 Dokumen	Rp 155.000.000	1 Dokumen	Rp 24.877.200	1 Laporan	Rp 30.000.000	1 Laporan	Rp 33.000.000	1 Laporan	Rp 36.300.000	1 Laporan	Rp 39.930.000	Dinas Perhubungan

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
1	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

		2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
		2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
		2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
		2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
		2.15.02.2.08.0008 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Meningkatnya Prasarana Perhubungan sesuai standar	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

		2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
		2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
		2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
		2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
		2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
		2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
		2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

	Meningkatnya Kendaraan yang Laik Jalan	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		2.15.02.2.05.0005 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	Meningkatnya keterpaduan moda Transportasi Wilayah	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
		2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
		2.15.02.2.03.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
		2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan

		Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
		2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		2.15.02.2.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		2.15.02.2.16.0001 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		2.15.02.2.16.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Kinerja penyelenggaraan perangkat daerah merupakan cerminan dari efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sepanjang tahun berjalan, seluruh perangkat daerah telah berupaya secara optimal dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah mendorong penguatan perencanaan berbasis kinerja, integrasi sistem informasi kinerja, serta peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi yang tercermin melalui pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Ketiga jenis indikator ini menjadi landasan dalam mengukur sejauh mana perangkat daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis perangkat daerah. Secara umum, capaian IKU menunjukkan tren yang positif, dengan persentase realisasi yang mendekati atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. IKU disusun mencerminkan prioritas pembangunan daerah dan selaras dengan indikator kinerja pada RPJMD, maupun provinsi dan nasional. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Singkawang serta target indikator selama periode 2025 – 2029 pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025-2029

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						KET.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengukur hasil dari pelaksanaan kegiatan secara lebih operasional. Sepanjang periode pelaporan, sebagian besar perangkat daerah berhasil memenuhi target IKK, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pelaksanaan kegiatan. Peningkatan ini tidak terlepas dari perbaikan dalam proses perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, serta pelaksanaan kegiatan yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran. Adapun IKK Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025 – 2029

No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						KET.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	49	50	52	54	55	57	
2	V/C Rasio di Jalan Kabupaten/Kota	0.31	0.31	0.33	0.33	0.35	0.35	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Rencana Strategis Dinas Perhubungan diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Dokumen Rencana Strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kegiatan (IKK), dan indikator kinerja daerah (IKD). Penyusunan dilakukan secara partisipatif dan berbasis data, dengan memperhatikan hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya, dinamika kebutuhan masyarakat, serta perkembangan regulasi dan kebijakan transportasi secara nasional dan regional.

Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen renstra Dinas Perhubungan ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategis Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan ditetapkan dengan peraturan pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan Dinas Perhubungan dapat melaksanakan peran strategisnya secara optimal dalam mendukung terwujudnya tata kelola transportasi yang modern, inklusif, dan

ramah lingkungan, sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap pembangunan Kota Singkawang yang maju, atraktif, dan berkelanjutan.

